

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Demi memenuhi syarat penulisan karya ilmiah peneliti telah memilih lima karya ilmiah sebelumnya yang terdiri dari satu literatur penelitian dan empat jurnal untuk dikaji sehingga karya ilmiah yang telah dipilih ini akan membantu penulis dalam memahami landasan teori dengan permasalahan penelitian terkait. Literatur penelitian pertama yakni berjudul *Japan: An Assessment of The International Labour Migration Situation: The Case of Female Labour Migrants* dipublikasikan oleh Mizuho Matsuda dalam *GENPROM Working Paper No 5 Program Promosi Gender International Labour Organization*. Penelitian ini ditulis oleh Matsuda dimana ia menjelaskan bahwa adanya globalisasi akan membuka peluang bagi tenaga kerja khususnya perempuan untuk dapat bermigrasi demi memperoleh peningkatan pendapatan, pemberdayaan dan kesetaraan gender. Namun disisi lain para migran perempuan juga lebih rentan dihadapkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dibandingkan dengan migran laki-laki. Bentuk termajinalkan pekerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki ini dimulai dari tahap perekrutan, tahap perjalanan maupun pada tahap menetap. Selanjutnya adapun bentuk-bentuk pelanggaran HAM ini biasanya berupa diskriminasi sosial akibat *xenophobia* berupa eksploitasi, pelecehan seksual hingga kerja paksa. Meskipun mereka bekerja, namun sejatinya muncul bentuk “diskriminasi gender baru” sebagai bukti bahwa tenaga migran perempuan termajinalkan dalam bentuk lain (Matsuda, n.d.).

Dalam tulisannya, Matsuda menjelaskan bahwa di negara Jepang, tenaga migran perempuan cenderung dipekerjakan dalam bidang jasa hiburan dan umumnya mereka berusia muda, bahkan tanpa latar belakang pendidikan. Mereka bekerja dengan cara menghibur di bar atau klub sebagai nyonya rumah, penyanyi hingga penari. Disinilah mereka dirugikan hak-hak asasi manusianya karena sering kali mereka terjebak dalam praktik merugikan diantaranya: a) Paspor atau tiket pulang dirampas, b) tidak dibayar bukannya, atau dibayarkan sekaligus saat pulang kampung, c) dikenakan hukuman dengan berbagai alasan, d) dikenakan kekerasan, e) dipaksa bekerja lembur diluar kontrak dan f) upah dibayarkan dengan utang terlebih dahulu, lebih parahnya mereka seringkali terjebak

dalam prostitusi sebagai bagian dari pekerjaan mereka bahkan mereka seringkali “diperdagangkan kembali”. Kelompok pekerja migran perempuan dalam bidang inilah yang banyak dirugikan karena mereka datang ke Jepang dengan visa liburan yang tidak dianggap sebagai pekerja berdasarkan kebijakan imigrasi di Jepang. Selain dibidang hiburan, Adapun pekerja migran di Jepang yang banyak bekerja di pabrik dan restoran sejak tahun 1980 dibawah peraturan imigrasi Jepang yang terus mengalami revisi seiring kebutuhan Jepang terhadap tenaga migran.

Disisi lain para migran dengan dokumen, seringkali ingin mengamankan status tinggal mereka melalui perkawinan, dimana hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks terkait izin khusus untuk tinggal hingga permasalahan mengenai perkawinan, perceraian, persalinan, kematian, kesehatan, pendidikan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Melihat situasi tersebut, Matsuda mengemukakan bahwa tujuan dari dipublikasikannya artikel ini ialah untuk mencegah pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap tenaga migran perempuan untuk mendorong pemerintah, organisasi, organisasi non pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil dan pekerja itu sendiri untuk dapat memperhatikan hak-hak tenaga migran melalui sebuah panduan dan kebijakan yang lebih ketat. Akan tetapi penelitian ini hanya memberikan gambaran latar belakang mengenai situasi pekerja migran khususnya perempuan pada awal kemunculannya saja (Matsuda, n.d.).

Diakhir tulisannya, Matsuda menjelaskan bahwa Jepang telah mengeluarkan kebijakan mengenai tenaga migran dibawah Undang-Undang Imigrasi, Undang- Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pengiriman Pekerja, Undang-Undang Anti-Prostitusi dan Undang-Undang *Fueiho* untuk mengatur praktik bisnis namun nyatanya pemerintah Jepang tidak mampu mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi situasi pekerja migran karena hukum belum cukup mengendalikan situasi migran tersebut. Sehingga pemerintah Jepang lebih memilih untuk membatasi migran yang masuk karena enggan berada dalam situasi tersebut. Meskipun seiring dengan kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja, pemerintah Jepang terpaksa mengubah pendirian politiknya dari kontrol regulasi menjadi penerimaan multi-budaya dan kebijakan, salah satunya melalui “izin tinggal khusus” yang diberikan pemerintah kepada keluarga beberapa pekerja migran yang telah melebihi masa tinggalnya. Meskipun masih ada beberapa kebijakan yang tidak jelas dan

sewenang-wenang (Matsuda, n.d.). Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mempertimbangkan aspek-aspek yang termarginalkan yang diterima oleh para pekerja migran di Jepang khususnya perempuan sebagai input terhadap kebijakan migran yang baru agar dapat menarik para pekerja migran demi memenuhi angka kebutuhan tenaga kerja di Jepang.

Kedua, adapun jurnal yang berjudul *Injustice Continuity: Gender Inequality in Japan in The 21st Century* yang ditulis oleh Mukhlis Arifin pada tahun 2021. Pada jurnal ini Arifin menyoroti bagaimana isu kesetaraan gender menjadi akar permasalahan yang mempengaruhi sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya di masyarakat Jepang yang diakibatkan oleh adanya konstruksi pemikiran konservatif oleh pemangku kepentingannya. Ketidaksetaraan ini membuat budaya patriarki yang menyebabkan perempuan di Jepang didomestifikasi dan mengalami *stereotype* bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas yang mempunyai dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pemikiran konservatif mengenai peran perempuan diranah publik di Jepang ini didasari oleh anggapan bahwa fungsi reproduksi perempuan merupakan sebuah hamatan yang menjadikan perempuan dianggap mempunyai keterbatasan fungsional. Secara historis, Arifin menjelaskan adanya domestifikasi perempuan tersebut diawali oleh adanya perkembangan ekonomi yang pesat yang disebut dengan “*economy miracle*” sehingga memicu adanya pembagian peran “ibu rumah tangga penuh” dan konsepsi “suami sebagai pencari nafkah” sebagai pemahaman kolektif dimasyarakat. Namun pada akhir tahun 1970an kondisi ekonomi mulai berubah dan mengharuskan ibu rumah tangga yang tidak memiliki keterampilan harus bekerja disektor formal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, kaum feminis di Jepang muncul untuk mendorong peraturan tentang kesetaraan kesempatan kerja pada tahun 1985 (Arifin, Mukhlis, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, Arifin menjelaskan bahwa upaya perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melawan penindasan patriarki berakar pada tatanan masyarakat di Jepang. Sehingga dalam tulisannya, Arifin menyoroti bagaimana kondisi kesetaraan gender sebagai upaya perempuan memperjuangkan hak-haknya melawan sistem patriarki pada akhir abad 20. Perjuangan perempuan di Jepang telah dimulai pada tahun 1947 melalui pekumpulan perempuan dalam *Women's and Minor Bureau (WMB)* yang menangani masalah ketenagakerjaan meskipun suaranya dalam menuntut kesetaraan masih

terhambat karena adanya diskriminasi dalam serikat pekerja itu sendiri. Perempuan tidak terlindungi oleh perlindungan serikat pekerja karena kehadirannya hanya dianggap sementara sebagai pengganti. Aliansi aktivis feminis di Jepang juga kurang kuat dalam menjalin hubungan kerjasama dengan politisi perempuan, lembaga pemerintah, brokrat nasional, aktivis hingga kementerian ketenagakerjaan karena adanya dominasi kepentingan dari pekerja laki-laki. Perempuan juga dijadikan sosok sentral dalam mendidik anak akibat adanya keputusan dari Kementerian Pendidikan Jepang bahwa perempuan harus dididik menjadi ibu (Arifin, Mukhlis, 2021).

Namun, pada tahun 2012 Jepang mengalami perubahan kebijakan yang memberikan harapan untuk memajukan partisipasi peran perempuan di dunia kerja. Kebijakan ini diusung oleh Shinzo Abe saat terpilih menjadi perdana menteri Jepang. Kebijakan ini menghubungkan secara eksplisit strategi revitalisasi ekonomi Jepang dan peningkatan jumlah pekerja perempuan yang dirangkai dalam program “*Womenomics*” dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan di pasar tenaga kerja Jepang. Tujuan dari *Womenomics* yakni: a) berfokus pada angkatan kerja perempuan untuk membantu Jepang mengelola tekanan demografi, tenaga kerja dan ekonomi yang mendesak. b) memberikan Abe wewenang dalam mendefinisikan kembali peran, peringkat dan reputasi Jepang di komunitas internasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja ekonomi serta rekam jejak Jepang dalam isu-isu perempuan. Kebijakan *Womenomics* ini diinisiasi Abe berdasarkan kerangka konferensi dunia yang di hadiri Jepang tentang status perempuan tahun 1975 di Mexico yang berisi rencana aksi internasional dalam mewujudkan kesetaraan gender yang melibatkan pemerintah dan komunitas internasional. Lebih lanjut Arifin menjelaskan bahwa sasaran kebijakan Abe dalam ranah pekerjaan perempuan bertujuan sebagai berikut: a) Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan b) Mengutamakan perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Selanjutnya Arifin memberikan 2 studi kasus bagaimana perempuan dimarginalkan dibidang pendidikan karena *Tokyo Medical School* mengagalkan peserta ujian perempuan dengan cara mengontrol nilai laki-laki agar lebih diuntungkan. Hal ini terjadi karena didasari oleh doktrin bahwa banyak pada dokter perempuan yang mengundurkan diri setelah menikah atau melahirkan. Aktivitas di bidang medis juga dinilai cenderung menurun seiring bertambahnya usia perempuan. Alasan-alasan tersebut tentunya melegitimasi bahwa

perempuan dinilai tidak mampu secara fisik untuk menjadi dokter. Studi kasus kedua, Arifin menyoroti komentar seksis dari Mori Yoshiro dalam pidatonya di penyelenggaraan *Tokyo Olympic 2021* yang menyiratkan bahwa perempuan terlalu banyak berbicara. Menariknya pada studi kasus kedua, banyak pihak yang mengecam Mori sebagai presiden Tokyo Olympics tersebut sehingga ia mundur dari posisinya dan digantikan oleh Ny. Seiko Hasimoto yang berasal dari kabinet perempuan Jepang (Arifin, Mukhlis, 2021). Pada akhirnya, kedua studi kasus inilah yang menunjukkan bahwa budaya patriarki di Jepang masih melekat pada badan-badan pemerintahan di Jepang, khususnya pada kelompok konservatif. Maka perjuangan pembebasan perempuan masih harus menempuh perjalanan penggerakkan yang cukup panjang karena Jepang belum memiliki organisasi payung berskala nasional yang mampu menanamkan ideologi tentang perempuan (Arifin, Mukhlis, 2021). Sehingga melalui jurnal ini penulis menemukan gambaran bagaimana budaya patriarki dapat menjadi faktor utama yang membuat Jepang memarjinalkan peran perempuan dalam bermasyarakat.

Ketiga, ada sebuah jurnal berjudul *Immigration, Women and Japan—A Leap Ahead and a Step Behind: A Qualitative Journalistic Approach* yang ditulis oleh Stephanie Palliard-Borg dan Jessica Holmgren tahun 2016. Hal yang melatar belakangi peneliti dalam menulis penelitian ini dimana pada jurnal ini dijelaskan bahwa kondisi Jepang yang sekarang telah didominasi oleh masyarakat yang lanjut usia yang berimplikasi pada konsekuensi sosial dan ekonomi. Jepang dikatakan mengalami deflasi ekonomi dikarenakan rendahnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan penuh waktu dari total rasio angkatan kerja. Padahal jika perempuan yang bekerja penuh waktu dan diberi upah maka akan meningkatkan penghasilan negara melalui penghasilan kena pajak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang sudah lanjut usia. Maka dari itu, Perdana Menteri Abe mengupayakan lapangan kerja bagi perempuan dalam mengembangkan karir, menjadi eksekutif dan menjadi pemimpin (Paillard-Borg & Holmgren, 2016).

Perdana Menteri Abe dalam reformasi struktural politiknya dengan cara menekankan pentingnya meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui penggabungan revisi undang-undang imigrasi Jepang yang membatasi lapangan kerja bagi perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Seiring dengan

pembukaan lapangan kerja bagi perempuan di Jepang maka kebutuhan akan tenaga kerja asing dalam sektor rumah tangga turut meningkat. Para tenaga asing ini diusulkan akan diperlukan untuk membantu perempuan di Jepang dalam menanggung beban tanggung jawab rumah tangga, perawatan anak dan lansia demi mengurangi ketegangan di keluarga Jepang. Namun kebijakan ini menemui hambatannya, yaitu: a) persepsi masyarakat tentang mempekerjakan orang lain untuk merawat keluarga dianggap sebagai tindakan tidak terhormat, b) bagi pekerja tidak terampil bahasa menjadi kendala, c) biaya upah yang mahal bagi keluarga kelas menengah untuk mempekerjakan orang dan berdasarkan hasil wawancara, responden menambahkan alasan sulitnya menerima pekerja asing rumah tangga adalah soal privasi keluarga dan hilangnya nilai-nilai tradisi di Jepang. Responden juga mengungkapkan terdapat kekhawatiran terkait tingkat kriminalitas dan kemungkinan meningkatnya angka pengangguran menjadi hal yang mengkhawatirkan (Paillard-Borg & Holmgren, 2016). Penelitian ini mengungkapkan peranan penting perempuan di Jepang dimana perempuan masih menempati posisi sentral dalam tatanan sosial di Jepang dengan menjalankan peran sebagai ibu, istri, pengurus rumah tangga dan pengasuh hingga kerabat lanjut usia. Sehingga perempuan di Jepang dihadapkan dengan persimpangan antara masa lalu dan masa depan untuk berkarier. Meskipun banyak perempuan Jepang terutama di perkotaan banyak yang mempertanyakan kesetaraan gender, tapi posisi tradisional perempuan di Jepang masih dihargai (Paillard-Borg & Holmgren, 2016). Kesimpulannya, peran pekerja rumah tangga perempuan di Jepang dapat memiliki peran penting bagi perempuan Jepang untuk dapat berkarier diluar rumah sekaligus tetap dapat berkeluarga dan merawat orang lanjut usia dibawah satu atap. Melalui penelitian ini penulis dapat mempererat benang merah antara migrasi tenaga asing dengan peran perempuan di Jepang serta pengaruhnya pada tingkat nasional hingga global. Dimana meningkatnya tenaga migran dapat menjadi solusi atas ketidak-seimbangan permintaan dan pasokan tenaga kerja di Jepang sekaligus dapat dijadikan alternatif solusi dalam mengatasi kondisi penurunan populasi di Jepang.

Selanjutnya, adapun jurnal keempat yang berjudul Fenomena *Shoushika*: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe yang ditulis pada tahun 2021. Dalam jurnal ini, fenomena *Shoushika* dijadikan sebagai faktor kunci akibat adanya perubahan pola pikir masyarakat, khususnya perempuan di Jepang saat ini. Banyak

perempuan di Jepang yang merasa dilema ketika harus membagi waktu kerjanya dengan urusan mengurus anak sehingga banyak masyarakat di Jepang yang lebih memilih untuk menunda atau tidak memiliki anak yang kemudian dan lebih memilih berkarir sehingga berimplikasi terhadap keamanan negara dari sektor populasi dan jumlah angkatan kerja untuk mempertahankan generasi (Br Karo et al., n.d.).

Maka demi memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, pemerintah Jepang membuat kebijakan yang memungkinkan kesempatan bagi migran untuk bekerja di Jepang. Namun sayangnya kebijakan ini menimbulkan permasalahan lain, yakni berupa dampak kehamornisan dikalangan masyarakat di Jepang yang terganggu. Masyarakat berfikir bahwa akibat dari banyaknya migran maka potensi warisan etnik dan budaya masyarakat Jepang akan luntur. Selain itu, masyarakat di Jepang juga memiliki kekhawatiran terhadap hilangnya kesempatan kerja serta meningkatnya kejahatan sebagai dampak dari terbukanya akses bagi pekerja migran (Br Karo et al., n.d.).

Selanjutnya jurnal ini menyinggung terkait kebijakan pemerintah Jepang pada era kepemimpinan Shinzo Abe yakni kebijakaan bernama *Abenomics*. Kebijakan ini berfokus pada program untuk mengtasi deflasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan angka kelahiran yang dinilai kurang efektif dan tidak memberikan perubahan yang signifikan. Jurnal ini menyebutkan bahwa pada akhirnya Jepang akan sangat ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Salah satu kasus relevan mengenai kebutuhan akan pekerja ada di sektor konstruksi dalam mempersiapkan *The Tokyo Summer 2020 Olympics* dan *The Tokyo Summer 2020 Paralympics* dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 150.000 pada saat itu. Sehingga pada era pemerintahannya, Shinzo Abe juga turut mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja ini dengan mendorong partisipasi perempuan Jepang di dalam dunia kerja. Kebijakan ini dinamakan sebagai kebijakan "*Womenomics*" yang kemudian direalisasikan dalam bentuk dukungan bagi perusahaan melalui adanya insentif, implikasinya perusahaan harus memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan serta memberikan lebih banyak jabatan kepemimpinan kepada karyawan perempuan (Br Karo et al., n.d.).

Kebijakan Shinzo Abe ini kemudian menuai dukungan dari kaum feminis karena dinilai sebagai bentuk reformasi bagi wanita di Jepang. Namun, juga mendapatkan penilaian negatif karena kebijakan ini dianggap akan memperparah krisis demografi di

Jepang. Kebijakan ini dinilai akan memicu kompetisi bagi perempuan untuk mendapatkan posisi setinggi mungkin sehingga mereka memilih untuk menunda perkawinan dan memiliki anak ataupun tidak ingin menikah sama sekali sehingga angka kelahiran di Jepang terus menurun. Menanggapi kondisi tersebut, Perdana Menteri Shinzo Abe kemudian melakukan upaya-upaya untuk mendukung pasangan muda dalam merawat anaknya seperti melalui program menggratiskan pendidikan bagi anak prasekolah. Adapun kebijakan lain yaitu meningkatkan usia pensiun masyarakat Jepang yang sebelumnya 65 tahun menjadi 70 tahun demi mencapai target ekonomi berkelanjutan (Br Karo et al., n.d.). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka jurnal ini akan dijadikan sebagai gambaran umum oleh penulis dalam menjabarkan kebijakan Shinzo Abe terhadap kondisi krisis tenaga kerja di Jepang dalam perspektif feminisme karena terdapat kesamaan kerangka berfikir dalam melihat latar belakang bagaimana pekerja migran ini sangat diperlukan di Jepang.

Selanjutnya jurnal kelima ialah sebuah jurnal yang ditulis oleh Keiichiro Hamaguchi selaku Direktur Jendral dari *The Japan Institute for Labour Policies and Training (JILPT)* yaitu sebuah Lembaga administratif berbadan hukum dengan tujuan untuk berkontribusi pada perencanaan kebijakan ketenaga kerjaan di Jepang. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul *How Have Japanese Policies Changed in Accepting Foreign Workers*. Dalam tulisannya Hamaguchi menjelaskan bahwa terdapat amandemen-amandemen kebijakan pemerintah Jepang dalam hal penerimaan tenaga migran. Kebijakan tenaga migran ini disebut dengan *Immigration Control Act (ICA)*. Pada salah satu sub-judulnya Hamaguchi menyebutkan bahwa di tahun 2018 Perdana Menteri Shinzo Abe yang sedang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang mengusulkan adanya perubahan terkait langkah-langkah mendasar dari proses penerimaan tenaga migran yang didasari oleh kondisi krisis tenaga kerja pada bidang usaha kecil dan menengah (UKM) di Jepang. Usulan Shinzo Abe ini kemudian dibahas oleh gugus kabinet yang mengusulkan kerangka umum dari system tersebut sebagai dasar dari “*Basic Policy in Economic and Fiscal Management and Reform*” tahun 2018 yang disertai dengan peninjauan kementerian keuangan dalam rangka menyusun rancangan undang-undang untuk amandemen terhadap sistem tersebut. Dimana tujuan dari adanya amandemen kebijakan ini ialah untuk menerima pekerja migran sebagai pekerja semi-terampil di berbagai industri di Jepang

(Hamaguchi, 2019).

Usulan Shinzo Abe ini kemudian diundangkan pada Desember 2018 dengan garis besar sebagai berikut: a) ditetapkan status kependudukan baru yakni pekerja migran tipe 1 dengan keterampilan untuk dapat terikat pekerjaan tertentu, tanpa pelatihan khusus. Pekerja migran tipe 1 ini merupakan eks-pemegang teknis yang telah menyelesaikan magang tahap kedua sehingga terbebas dari ujian khusus industri yang ditetapkan oleh kementerian dengan yuridiksi yang sesuai dengan industri terkait. Pekerja migran tipe 1 ini diperbolehkan tinggal lima tahun tanpa membawa keluarga b) terdapat pekerja tipe 2 yaitu pekerja dengan keterampilan tinggi yang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas tugas profesional ataupun menjalankan peran sebagai pengawas. Pekerja tipe 2 ini tidak memiliki Batasan perpanjangan masa tinggal dan diperbolehkan membawa keluarga c) amandemen ini hanya berlaku untuk bidang industri yang memerlukan tenaga migran sebagai kompensasi dari krisis sumber daya manusia d) Terdapat perluasan sektor industri: pada 2018 hanya ada 5 sektor terdaftar menjadi 14 sektor yang diperiksa secara berkelanjutan d) menteri melarang adanya perlakuan “diskriminatif” terhadap pekerja migran ketika menentukan remunerasi atau kondisi kerja lain sehingga pemberi kerja diharapkan dapat memberi pekerja migran upah yang minimal setara dengan pekerja Jepang (Hamaguchi, 2019).

Selanjutnya Hamaguchi juga menjelaskan setelah terjadinya amandemen ICA ini pemerintah mulai menyiapkan prosedur administrasi dan tuntunan sehari-hari demi mendukung penduduk non-Jepang dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pengembangan kerangka konsultasi, pengembangan tata pemeliharaan lingkungan, penyediaan layanan medis, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan hingga bantuan kerja. Pemerintah juga mempertimbangkan upaya signifikan untuk menghentikan aktivitas *broker* yang eksploratif melalui perjanjian bilateral antar negara untuk memproteksi pekerja migran dengan cara penyingkapan imigrasi yang lebih ketat terhadap pelamar ketika mengajukan ijin tinggal (Hamaguchi, 2019).

Maka, jurnal ini dijadikan penulis sebagai pembanding mengenai pandangan tentang kebijakan pekerja migran dari sisi pemerintahan Jepang untuk dibandingkan dengan jurnal ke-empat yang menyoroti perspektif masyarakat terhadap kebijakan pekerja migran pada era pemerintahan Shinzo Abe. Berdasarkan tinjauan literatur yang ditemukan

secara umum telah didapati bahwa setiap literatur memiliki korelasi atau persamaan satu dengan yang lainnya dalam mengembangkan fokus penelitian sehingga penulis akan memperkuat temuan-temuan sebelumnya dengan data-data yang relevan. Adapun perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah perspektif feminisme yang nantinya akan menjelaskan bagaimana kebijakan tenaga migran di Jepang terbentuk sehingga diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di Jepang pada era Shinzo Abe. Melalui perspektif tersebut maka akan terlihat bagaimana implementasi tersebut dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai sebuah rekomendasi kebijakan baru yang dapat di perhitungkan pemerintah Jepang dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam sektor industri nantinya. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi lebih banyak peneliti lainnya dalam meninjau kebijakan pekerja migran di Jepang.

2.2 Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep sebagai landasan teoritik dalam proses penulisan dengan memanfaatkan kerangka berfikir dari para ahli dalam studi Hubungan Internasional.

2.2.1 Feminisme Liberal

Seiring berjalannya waktu, feminisme semakin berkembang dan dijadikan sebagai sebuah konsep yang kian disempurnakan oleh gelombang feminisme selanjutnya. Periode kemunculan feminisme ini sesuai dengan pendapat Jill Steans dan Lloyd Pettiford dalam bukunya yang berjudul *International Relation: Perspectives and Themes* pada bab 6 yang dicetak pada tahun 2009, dikatakan bahwa feminisme ini lahir karena terciptanya ruang akibat adanya perdebatan teoritis terbuka mengenai hubungan internasional yang mengabaikan gender di dalamnya pada tahun 1860-an. Steans dan Pettiford juga menyatakan bahwa feminis memiliki beberapa perspektif, yaitu: a) menggunakan gender sebagai kategori utama dari analisis, b) menganggap gender sebagai sebuah jenis hubungan kekuasaan tertentu, c) mencermati penggolongan publik atau privat sebagai isu utama dalam pemahaman kita tentang hubungan internasional, d) menelusuri cara-cara dimana

ide-ide tentang gender menjadi bernilai untuk memfungsikan lembaga-lembaga internasional utama, e) menyarankan agar gender ditanamkan dalam tatanan internasional, dan f) menentang asumsi-asumsi dominan yang membagi antara marjinal atau sentral dalam studi hubungan internasional (Steans & Diez, 2010). Feminisme juga dapat di definisikan sebagai gerakan politik global pembebasan perempuan dan masyarakat berdasarkan kesetaraan bagi semua orang (Mackay, 2015).

Penganut liberal memandang negara sebagai seorang ‘wasit’ yang diantara persaingan kepentingan-kepentingan suatu masyarakat yang terbuka dan pluralistik namun bagi kaum feminis liberal negara sebagai bentuk organisasi politik yang dominan di dunia nyatanya belum mampu sepenuhnya adil dan tidak memihak dalam perlakuannya terhadap perempuan (Steans & Diez, 2010). Artikulasi dari feminisme liberal ialah sebagai filosofi politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang menindas demi mencapai *gender equality*. Agenda politik dari feminisme liberal ini ialah mengatasi kesenjangan seperti memperoleh hak untuk memilih, memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan hingga menjamin kesetaraan kesempatan sosial, politik dan ekonomi. Pada intinya feminis liberal memperjuangkan kebebasan karena kaum feminis menilai bahwa perempuan telah tertindas secara sosial (Oxley, 2011). Agenda tersebut tercipta karena menurut feminis liberal bahwa norma-norma sosial, pola kerja berbayar dan perundang-undangan formal itu menghambat perempuan untuk masuk atau sukses di dunia publik. Hal ini diakibatkan oleh stigma yang melekat pada masyarakat terhadap perempuan dimana perempuan diperlakukan sebagai kaum yang kurang kompeten dibandingkan kaum laki-laki di dunia publik.

Sehingga segala bentuk stigma berimplikasi bagi perempuan dimana perempuan menjadi objek diskriminasi di dunia publik seperti bisnis, hukum, kedokteran, teknik, teknik informasi dan sebagainya. Stigma inilah yang kemudian membuat perempuan tidak akan bisa berbuat sebaik yang dilakukan laki-laki di dunia publik karena kurangnya antusiasme dan harapan kepada perempuan itu sendiri yang akan memperkecil kesempatan bagi perempuan untuk dapat melakukan hal yang serupa dengan laki-laki. Maka feminis liberal ingin melakukan

reformasi sehingga memungkinkan perempuan dan kelompok marjinal lainnya untuk mencapai kesuksesan seperti yang dicapai oleh laki-laki (Tong, 2012). Dari perspektif liberal, partisipasi dalam kehidupan publik merupakan kunci untuk menajukan status perempuan. Kaum liberal berpendapat bahwa perempuan sama seperti laki-laki yang mampu mengembangkan intelektual dan moral kemajuan. Perempuan juga merupakan makhluk rasional dan berhak berpartisipasi dalam kehidupan publik untuk memilih dan bahkan secara luas dapat berkontribusi dalam perdebatan mengenai isu-isu politik, sosial dan moral dibandingkan hanya terbatas pada lingkup privat di rumah dan keluarga yang terwakili dalam kehidupan publik oleh ‘kepala rumah tangga’ atau laki-laki (Tong, 2012).

Feminis liberal berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya memandang adanya perbedaan gender hanyalah dampak dari diskriminasi. Sehingga proyek politik para feminis liberal pada awalnya berfokus untuk menjamin hak-hak dan keistimewaan yang sudah dinikmati oleh laki-laki bagi perempuan untuk dapat mendapatkan hal yang serupa (Steans & Diez, 2010). Hal ini dilandasi oleh kesadaran para feminis liberal bahwa secara historis, negara tidak bersikap setara. Sehingga para feminis liberal percaya bahwa dengan memperluas hak-hak perempuan maka akan memberikan mereka sarana dalam mencapai kepentingan dalam “*political order*” dan “*national community*”. Hak-hak tersebut meliputi keterlibatan perempuan dalam perolehan suara kemudian perolehan kesempatan yang sama di dalam pendidikan, di lembaga-lebaga sosial hingga di tempat kerja (Steans & Diez, 2010).

Berdasarkan jurnal berjudul “*History of Feminism*” yang ditulis oleh Tonny Odhiambo dari Universitas Nairobi mengatakan bahwa feminisme itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan politik, budaya atau ekonomi dengan tujuan untuk menegakkan persamaan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan. Feminisme pada awalnya muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang mengacu pada terjadinya gerakan hak pilih perempuan untuk dapat menyuarakan hak pilihnya pada pemilu. Tujuan tersebut kemudian menjadi tujuan dari *American Equal Rights Association* pada tahun 1866 yang kemudian digantikan oleh *National Women Suffrage Association (NWSA)* dan *The*

American Women Suffrage Association pada tahun 1869 dengan tujuan untuk meningkatkan derajat perempuan di masyarakat secara keseluruhan. Odhiambo berpendapat bahwa kemunculan feminisme gelombang pertama ini tidak memiliki inklusivitas namun gelombang ini mampu melahirkan beberapa tokoh feminis yang gigih seperti Susan B Anthony yaitu seorang aktivis hak pilih yang berkampanye untuk hak pilih orang kulit hitam hingga rutin menerbitkan majalah *The Revolutionary* (Odhiambo). Feminisme liberal merupakan arus pemikiran yang memperjuangkan persamaan hak, termasuk hak politik. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa letak terjadinya penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh kurangnya hak politik dan sipil sehingga hal inilah yang harus direformasi demi menciptakan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Feminis liberal disebut juga sebagai feminis egaliter yaitu menuntut kesetaraan politik, persamaan hak dalam pernikahan, akses terhadap pasar tenaga kerja, persamaan hak pendidikan serta persamaan hak pekerjaan atau upah yang setara (Cottains, 2020).

Melalui perspektif feminis liberal penulis menemukan bahwa kesetaraan gender berupa hak-hak serta kesempatan yang sama dapat mendorong angka produktivitas di Jepang dengan mengoptimalkan kinerja perempuan. Sehingga Jepang dapat mengatasi ancaman stagnasi ekonominya akibat fenomena *Shoushika*. Kondisi tersebut kemudian turut membuka kesempatan kerja bagi pekerja migran. Meskipun pekerja migran perempuan justru rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia meskipun mereka dapat bekerja.

2.2.2 Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal merupakan sebuah teori modern yang melihat penindasan terhadap perempuan sebagai bentuk dominasi yang paling fundamental dan universal, dan tujuannya adalah untuk memahami dan mengakhiri penindasan tersebut. Maka, perempuan sebagai kelompok mempunyai kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan laki-laki yang terdang sebagai instrumen dominasi patriarki. Asal-usul feminisme radikal menegaskan bahwa kekuasaan laki-laki tidak terbatas pada dunia politik, publik dan pekerjaan berbayar, namun juga meluas kehidupan pribadi. Ini berarti bahwa konsep-konsep tradisional mengenai

kekuasaan dan politik ditantang dan diperluas kebidang kehidupan 'pribadi' seperti keluarga dan seksualitas, yang dipandang sebagai instrumen dominasi patriarki. Feminis radikal adalah teori patriarki yang berarti 'kepala suku', yang menjadi inti perdebatan abad ketujuh belas mengenai sejauh mana kekuasaan monarki. Patriarki itu sendiri dipertahankan melalui proses pengkondisian yang dimulai dengan sosialisasi masa kanak-kanak dalam keluarga dan diperkuat oleh pendidikan, sastra dan agama sedemikian rupa. Maka feminis modern menganggap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanyalah sebuah ekspresi kekuasaan laki-laki (Bryson, 1992).

Selanjutnya teori patriarki dalam perspektif feminisme radikal menjelaskan bahwa individu memiliki peran dan pengalaman sosial yang berbeda, dengan patriarki berfokus pada status peran dan status ekonomi seseorang. Patriarki merupakan manifestasi dari sistem hak universal, sedangkan patriarki adalah manifestasi dari sistem kekuasaan. Namun semua individu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, misalnya rasa memiliki yang kuat, rasa percaya diri yang kuat, dan rasa memiliki yang kuat terhadap suatu kelompok. Menurut kaum feminis radikal, kondisi patriarki tersebut tidak cukup diubah melalui perubahan ekonomi saja karena perempuan masih bisa dieksploitasi secara ekonomi di ranah patriarki publik dan swasta, dan bukan dilihat sebagai anggota proletariat yang netral gender. Eksploitasi tenaga kerja mereka baik dalam angkatan kerja yang dibayar dan di rumah hanyalah salah satu dimensi dari penindasan yang dilakukan oleh laki-laki. Perekonomian mungkin merupakan struktur patriarki yang penting, di mana laki-laki mendominasi perempuan (Bryson, 1992).

Feminis radikal dapat didefinisikan sebagai aliran feminisme yang menyoroti masalah subordinasi perempuan terhadap laki-laki karena feminis radikal berpendapat bahwa patriarki sebagai sebuah sistem yang bercirikan kekuasaan, dominasi, hierarki dan persaingan adalah sumber utama subordinasi perempuan terhadap laki-laki yang berakibat pada kesejahteraan perempuan sehingga tidak mampu direformasi. Kekuasaan, dominasi dan hierarki serta persaingan inilah yang harus dihancurkan menurut feminis radikal (Tong, 2012). Sedangkan, patriarki yang dimaksudkan oleh kaum feminis radikal merupakan asumsi yang menempatkan

identitas perempuan itu feminin itu berada dibawah laki-laki dengan identitas gender yang maskulin. Maka, feminis radikal berupaya mengekspos dan menkonstruksi ulang norma-norma tersebut. Feminis telah menunjukkan bahwa konstruksi identitas gender ini telah melanggengkan gagasan normatif terkait peran yang harus dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Padahal pembagian peran ini bukan terjadi secara alamiah namun merupakan hasil dari konstruksi sosial. Identitas inilah yang kemudian membentuk dan mempengaruhi interaksi global dalam hubungan internasional (Smith, n.d.).

Kemunculan feminisme radikal ini diperkirakan muncul pada tahun 1960-an di Amerika dengan empat ciri utama sebagai indikator indentifikasi feminis radikal, yaitu: Pertama, feminis radikal percaya bahwa keberadaan patriarki dan berupaya untuk mengakhirinya. Kedua, feminisme radikal mempromosikan ruang khusus bagi perempuan dan pengorganisasian politik khusus perempuan sebagai hal terpenting. Ketiga, landasan utama terjadinya penindasan terhadap perempuan adalah kekerasan laki-laki. Keempat, mengedepankan kekerasan laki-laki dalam memperluas analisis mereka (Mackay, 2015). Kekerasan diartikan sebagai cara laki-laki mengontrol, mendominasi dan melanggengkan subordinasi perempuan. Selanjutnya, feminis radikal menyatakan bahwa kekerasan bukanlah fenomena individu yaitu seorang laki-laki yang melawan seorang perempuan, melainkan dilihat sebagai masalah kolektif yang dimungkinkan dan bahkan didorong oleh sistem patriarki di masyarakat (Cottains, n.d.).

Menekankan inti dari feminisme radikal itu sendiri disebut “radikal” karena mereka sedang berjuang membawa perubahan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Kelompok radikal ini berkonsentrasi pada kekhawatiran tradisional perempuan tentang cinta, seks, anak-anak dan interpersonal hubungan. Feminisme radikal bersikeras bahwa penindasan mendasar yang pertama dalam sejarahnya umat manusia adalah seksisme. Pada bulan Desember 1969 Feminisme Radikal New York (NYRF) mengadopsi sebuah manifesto (Rhodes, 2005) yang menyatakan bahwa:

“The oppression of women [is] a fundamental political oppression wherein women are categorized as an inferior class based upon their sex... [The]

purpose of male chauvinism is primarily to obtain psychological ego satisfaction, and only secondarily does this manifest itself in economic relationships. For this reason we do not believe that capitalism, or any other economic system, is the cause of female oppression, nor do we believe that female oppression will disappear as a result of a purely economic revolution.” (Rhodes, 2005).

Adapun kegunaan paradigma feminis radikal dapat menjelaskan bagaimana adanya ketidaksetaraan gender berdasarkan jenis kelamin karena budaya patriarki yang melekat dapat menghambat produktivitas di Jepang. Sehingga didapati bahwa akar permasalahan yang harus ditangani dalam mengatasi fenomena depopulasi maupun ancaman stagnasi ekonomi di Jepang yakni berupa pandangan konservatif masyarakat di Jepang terhadap perempuan yang harus diubah, termasuk bagi para migran perempuan. Hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut karena akan sangat berdampak terhadap situasi pekerja migran yang dibutuhkan oleh Jepang dalam mencapai produktivitasnya.

2.2.3 Pekerja Migran

Berdasarkan makna yang dikutip dari *Migration for Employment Convention 1949*, pekerja migran diartikan sebagai seseorang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk dipekerjakan (ILO, 1999). Menurut teori migrasi mikro, migrasi itu sendiri bergeser dari “individu” menjadi keluarga atau rumah tangga. Teori migrasi mikro berasumsi bahwa individu atau unit pengambilan keputusan keluarga bertindak secara rasional dengan tujuan memaksimalkan utilitas yang terkait dengan pendapatan dalam bermigrasi. Adapun teori makrostruktur yang berasumsi bahwa sebuah migrasi terjadi karena sebuah proses kontemporer dan historis. Mereka memandang migrasi internasional sebagai dampak dari perubahan ekonomi, sosial dan politik yang membuat individu atau rumah tangga untuk mengambil keputusan migrasi (Stahl, 1995). Secara lebih lanjut, Stahl menjelaskan bahwa imigrasi tenaga kerja banyak terjadi di negara-negara industri. Imigrasi tenaga kerja ini bermanfaat untuk mengurasi kekurangan

pada pekerjaan tertentu, berfungsi untuk memastikan kapasitas industri, mencegah inflansi upah, meringankan transformasi struktural menuju produksi yang lebih padat. Dampak migrasi tenaga kerja ini mampu membuat negara industri tersebut untuk tetap kompetitif secara internasional. Tentunya melalui pengendalian administratif atau legislatif negara penerima dalam menyesuaikan penerimaan jumlah pasokan tenaga migran sesuai dengan siklus bisnis (Stahl, 1995). Sedangkan menurut *International Labor Organization* (ILO) pekerja migran didefinisikan sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk dipekerjakan selain untuk kepentingannya sendiri (Simon et al., 2015).

Pekerja migran juga didefinisikan sebagai migrasi tenaga kerja internasional yakni perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan pekerjaan. Saat ini banyaknya orang yang bekerja di negara yang bukan negara kelahirannya diperkirakan mencapai 164 juta orang. Dalam proses migrasi tersebut, banyak dari mereka yang rentan menanggung resiko besar meskipun telah terdapat upaya dalam menjamin perlindungan (IOM, n.d.). Pekerja migran ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan Pembangunan di negara tujuannya. Sedangkan negara asal menerima manfaat besar dari pengiriman uang serta keterampilan yang mereka dapatkan selama pengalaman migrasi mereka. Meskipun proses migrasi tersebut menimbulkan masalah yang kompleks dalam hal tata kelola, perlindungan pekerja migran, hubungan migrasi dan Pembangunan serta kerjasama internasional yang terbentuk (ILO, n.d.).

Dengan demikian konsep pekerja migran dapat digunakan dalam memahami peran pekerja migran sebagai fokus utama penelitian. Selain itu konsep pekerja migran dapat digunakan dalam memahami situasi diskriminatif yang dialami oleh pekerja migran dibawah kebijakan pada era pemerintahan Abe. Konsep pekerja migran ini juga menjadi acuan utama yang akan disoroti oleh perspektif feminisme liberal dan feminisme radikal sebagai subjek utama dalam penelitian ini.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta literatur yang sudah penulis paparkan, maka penulis berasumsi bahwasannya: “Perspektif feminisme merupakan perspektif yang dapat

digunakan untuk meninjau implementasi kebijakan *Immigration Control Act* (ICA) pada era Shinzo Abe. Implementasi kebijakan tersebut dapat ditinjau melalui sudut pandang feminisme liberal dan feminisme radikal. Melalui tinjauan perspektif feminisme liberal, penulis melihat bahwa terdapat kemajuan bagi perempuan Jepang dalam memperoleh pekerjaan sekaligus membuka peluang bagi pekerja migran untuk turut berkontribusi. Meskipun pada praktiknya pekerja migran perempuan masih mengalami “diskriminasi gender baru” saat bekerja. Sedangkan melalui tinjauan perspektif radikal penulis menemukan bahwa pekerja migran perempuan telah menjadi kaum yang rentan terhadap eksploitasi, pelecehan dan kekerasan dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki.”

2.4 Kerangka Analisis

Dalam memahami kerangka teori diatas, maka penulis merumuskan skema kerangka analisis sebagai berikut :

